**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Laporan Bulanan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Pembinaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada pasal 7 ayat (1) diatur bahwa Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya pasal 10 ayat (1) diatur bahwa penyampaian laporan dilakukan secara online melalui aplikasi https://emonev.ntbprov.go.id.

Untuk mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan daerah, perlu dikembangkan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan. Dalam Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2022 memuat tentang target pencapaian kinerja dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan Pemerintah Daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dana penggunaan pembiayaan, serta dengan asumsi yang mendasarinya pada tahun 2022.

Rancangan kerangka ekonomi daerah Provinsi NTB Tahun 2022 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2022. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Provinsi NTB baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah pada tahun keempat RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2022. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis *Money Follows Program*.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun keempat RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 harus dapat mendukung semua target-target pembangunan dan visi Misi Pemerintah Provinsi NTB sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi NTB 2019-2023. Untuk itu, dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai RPJMD Provinsi NTB 2019-2023. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi NTB tahun 2022 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

1. **Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022**

Prioritas dan sasaran pembangunan Nusa Tenggara Barat ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tahun 2022 merupakan tahun keempat dari perencanaan jangka menengah tahun 2019-2023.

Visi pembangunan Provinsi NTB sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah “*Membangun Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang*”. Visi tersebut diimplementasikan melalui enam misi, yaitu :

1. NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektifitas wilayah.
2. NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang beritegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.
3. NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.
4. NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
5. NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.
6. NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.
7. **Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022**

Dalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari periode RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang meliputi:

1. Pemulihan sosial ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19, dengan strategi:
2. Penguatan sektor kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19;
3. Jaring Pengaman Sosial (JPS); serta
4. Penanganan dampak ekonomi masa pandemi COVID-19.
5. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang memadai, dengan strategi:
6. Mengoptimalkan pertanian/agribisnis dan investasi, serta penyerapan tenaga kerja melalui kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta;
7. Pemulihan dan pengembangan sektor/aktivitas pariwisata;
8. Mengembangkan industri olahan dan alat-mesin berbasis pertanian, kehutanan, pertambangan dengan pola kemitraan;
9. Meningkatkan konektivitas wilayah dan kinerja pelayanan infrastruktur jalan, sumber daya air dan energi, terutama pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
10. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi, dengan strategi:
11. Mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah;
12. Mendorong pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat;
13. Memperluas akses terhadap kesempatan kerja dan peluang berusaha; serta
14. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
15. **Matriks Tujuan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022**

Tabel 1-1 Penyesuaian Target Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Misi** | **Tujuan** | **Indikator Tujuan** | **Sasaran**  **Indikator Sasaran** |
| 1 | Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah | Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana | Indeks Risiko Bencana (Point) | Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana |
| Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan | Indeks Aksesibilitas | Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah |
| Meningkatnya konektivitas antar wilayah |
| 2 | Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi | Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel | Indeks Reformasi Birokras | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah |
| Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah |
| Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
| Meningkatnya Profesionalisme ASN |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat |
| 3 | Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah | Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing | Indeks Kesehatan | Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat |
| Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing | Indeks Pendidikan | Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan |
| 4 | Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan | Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |  |
| Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup |
| Neraca pengelolaan sampah | Meningkatnya Pengelolaan Persampahan |
| 5 | Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi | Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas | Indeks Daya Beli | Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha) |
| Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas |
| Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin |
| Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan |
| Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin |
| Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok |
| Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup |
| Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan | Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) | |
|  |  | Meningkatnya daya saing pariwisata |
| Terwujudnya perindustrian yang unggul | Pertumbuhan Industri | |
|  | Meningkatnya daya saing industri |
| Menurunnya pengangguran terbuka |
| 6 | Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan | Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia) | Indeks Kriminalitas | Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat |
|  | Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah |
| Partisipasi politik masyarakat | |
|  | Meningkatnya kesadaran politik masyarakat |
| Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | |
|  | Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

**BAB II**

1. **RINGKASAN APBN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022**
   1. **APBN (DEKONSENTRASI) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Tabel 2-1 Progres APBN (DEKONSENTRASI) Bulan Desember 2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun Anggaran 2022** | | | | | |
| **No** | **OPD** | **Pagu(Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Keu (%)** | **Fisik (%)** |
|  | | | | | |
| 1 | BAPPEDA | 1,209,294,000 | 1,135,773,050 | 93.92 | 100.00 |
| 2 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 2,979,926,000 | 2,948,002,989 | 98.93 | 98.93 |
| 3 | DINAS KESEHATAN | 14,251,005,000 | 12,086,544,454 | 84.81 | 84.81 |
| 4 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | 13,199,355,000 | 9,986,124,150 | 75.66 | 75.66 |
| 5 | DINAS PARIWISATA | 1,680,000,000 | 1,668,687,119 | 99.33 | 99.33 |
| 6 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 2,754,585,000 | 2,663,427,180 | 96.69 | 96.69 |
| 7 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 518,774,000 | 500,353,104 | 96.45 | 96.45 |
| 8 | DINAS PERDAGANGAN | 1,243,142,000 | 1,086,828,770 | 87.43 | 87.43 |
| 9 | DINAS PERINDUSTRIAN | 1,658,000,000 | 1,646,642,265 | 99.31 | 99.31 |
| 10 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 422,567,000 | 422,567,000 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 23,147,966,000 | 22,342,269,164 | 96.52 | 96.52 |
| 12 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 4,401,457,000 | 4,175,865,840 | 94.87 | 97.72 |
| **Tahun Anggaran 2022** | | | | | |
| **No** | **OPD** | **Pagu(Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Keu (%)** | **Fisik (%)** |
|  | | | | | |
| 13 | INSPEKTORAT | 220,019,000 | 220,017,725 | 100.00 | 100.00 |
| 14 | SEKRETARIAT DAERAH (BIRO HUKUM DAN BIRO PEMERINTAHAN) | 1,172,545,000 | 1,172,204,435 | 99.97 | 99.97 |
| **Jumlah Belanja** | | **68,858,635,000** | **62,055,307,245** | **90.12** | **95.20** |

Sumber Data : - Laporan OPD

1. **APBN (TUGAS PEMBANTUAN) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Tabel 2-2 Progres APBN (TUGAS PEMBANTUAN) Bulan Desember 2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun Anggaran 2022** | | | | | | |
| **No** | **OPD** | **Pagu(Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Keu (%)** | **Fisik (%)** |
|  | | | | | | |
| 1 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 47,711,745,000 | 44,826,253,572 | 93.95 | 93.95 |
| 2 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 105,641,329,000 | 75,005,622,249 | 71.00 | 100.00 |
| 3 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 1,269,313,000 | 1,229,662,302 | 96.88 | 96.88 |
| 4 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1,315,132,000 | 1,315,111,250 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 27,609,877,000 | 27,500,371,614 | 99.60 | 100.00 |
| **Jumlah Belanja** | | **183,547,396,000** | **149,877,020,987** | **81.66** | **98.17** |

Sumber Data : - Laporan OPD

1. **RINGKASAN APBD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022, belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp.** **6.317.143.781.896,-** yang terbagi menjadi 4 (jenis) belanja yaitu :

1. Belanja Operasional sebesar **Rp.** **3.971.329.976.336,-**
2. Belanja Modal sebesar **Rp.** **1.467.153.759.347,-**
3. Belanja Tidak terduga sebesar **Rp. 1.948.333.713,-**
4. Belanja transfer sebesar **Rp. 876.711.712.500,-**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022 secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2-4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **JUMLAH** |
| *1* | *2* | *4* |
| **1.** | **PENDAPATAN** | **5.670.486.399.401,00** |
| **a.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | 2.750.248.736.300,00 |
|  | * Pajak Daerah | 1.766.560.250.000,00 |
|  | * Retribusi Daerah | 44.103.870.600,00 |
|  | * Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 60.349.184.000,00 |
|  | * Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 879.235.431.700,00 |
| **b.** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **2.901.439.218.350,00** |
|  | * Transfer Pemerintah Pusat | 2.899.777.132.350,00 |
|  | * Transfer Antar Daerah | 1.662.086.000.00 |
| **c.** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **30.154.665.751,00** |
|  | * Pendapatan Hibah | 30.154.665.751,00 |
| **2** | **BELANJA** | **6.317.143.781.896,00** |
| **a.** | **BELANJA OPERASI** | **3.970.631.157.936,00** |
|  | * Belanja Pegawai | 1.806.145.150.332,00 |
|  | * Belanja Barang dan Jasa | 1.848.502.718.703,00 |
|  | * Belanja Bunga | 41.539.588.600,00 |
|  | * Belanja Subsidi | 207.370.800.00 |
|  | * Belanja Hibah | 266.555.429.501,00 |
|  | * Belanja Bantuan Sosial | 7.680.900.000,00 |
| **b.** | * **BELANJA MODAL** | **1.467.153.759.347,00** |
|  | Belanja Modal Tanah | 9.850.000.000,00 |
|  | * Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 362.908.583.317,00 |
|  | * Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 535.733.332.502,00 |
|  | * Belanja Modal Jalan. irigasi dan jaringan | 519.498.306.324,00 |
|  | * Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 39.163.537.204,00 |
| **c.** | * **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **1.948.333.713,00** |
|  | Belanja Tidak Terduga | 1.948.333.713,00 |
| **d.** | * **BELANJA TRANSFER** | **876.711.712.500,00** |
|  | Belanja bagi hasil | 871.506.125.000,00 |
|  | * Belanja bantuan keuangan | 5.205.587.500,00 |
|  | * **SURPLUS / (DEFISIT)** | **(646.657.382.495,00)** |
| **3.** | **PEMBIAYAAN DAERAH** |  |
|  | **Penerimaan Pembiayaan Daerah** | **646.657.382.495.00** |
|  | - Sisal Lebih Perhitunagn Anggaran Tahun Sebelumnya | 84.156.506.495.00 |
|  | - Penerimaan Pinjaman Daerah | 562.500.000.000,00 |
|  | **Pengeluaran Pembiayaan** | 876.000.00 |
|  | Penyertaan Modal Daerah |  |
|  | **PEMBIAYAAN NETTO** | **646.657.382.495,00** |
|  | **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN** | **0,00** |

**BAB III**

**PELAKSANAAN ANGGARAN**

1. **Program/Kegiatan DPA APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022**

Laporan penyerapan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022 status sampai dengan Desemberdan disandingkan dengan progres bulan Desember 2021dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3-2 sandingan progres APBD bulan Desember 2021 dan 2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun Anggaran 2021** | | | | | | | **Tahun Anggaran 2022** | | | | | |
| **No** | **OPD** | **Pagu(Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Keu (%)** | **Fisik (%)** | **OPD** | | **Pagu(Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Keu (%)** | **Fisik (%)** |
|  | | | | | | |  | | | | | |
| 1 | Biro Pemerintahan | 1,580,422,900 | 1,560,556,006 | 98.74 | 98.74 | Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah | | 1,280,000,000 | 1,272,071,742 | 99.38 | 99.38 |
| 2 | Biro Kerjasama | 549,612,324 | 500,342,182 | 91.04 | 91.04 | Biro Administrasi Pembangunan | | 696,750,550 | 684,138,183 | 98.19 | 98.19 |
| 3 | Biro Hukum | 1,236,489,895 | 1,156,421,411 | 93.52 | 93.52 | Biro Hukum | | 1,302,000,000 | 1,248,893,284 | 95.92 | 95.92 |
| 4 | Biro Organisasi | 1,149,205,258 | 1,088,392,666 | 94.71 | 96.66 | Biro Organisasi | | 2,002,339,000 | 1,821,365,523 | 90.96 | 90.96 |
| 5 | Biro Perekonomian | 1,605,809,316 | 1,518,844,762 | 94.58 | 97.00 | Biro Perekonomian | | 2,633,514,200 | 2,318,358,518 | 88.03 | 88.03 |
| 6 | Biro Bina Adm Pengendalian Pembangunan & LPBJP | 3,741,345,970 | 3,635,800,385 | 97.18 | 100 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | | 3,102,192,000 | 2,985,050,032 | 96.22 | 96.22 |
| 7 | Biro Umum + KDH Wa KDH | 142,297,697,545 | 134,073,978,735 | 94.22 | 96.37 | Biro Umum | | 111,152,072,271 | 96,388,589,977 | 86.72 | 100 |
| 8 | Biro Humas dan Protokol | 4,732,422,840 | 4,588,686,154 | 96.96 | 96.96 | Biro Administrasi Pimpinan | | 8,703,600,000 | 8,560,295,960 | 98.35 | 98.35 |
| 9 | Biro Kesejahtraan Rakyat | 82,493,517,600 | 75,056,500,360 | 90.98 | 98.50 | Biro Kesejahtraan Rakyat | | 71,369,587,825 | 69,029,766,694 | 96.72 | 100 |
| 10 | Sekretariat DPRD + DPRD | 111,863,913,822 | 105,499,541,778 | 94.31 | 100 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | | 128,177,831,741 | 120,649,100,319 | 94.13 | 94.13 |
| 11 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2,008,563,761,955 | 1,968,553,454,643 | 98.01 | 98.44 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 1,748,648,664,827 | 1,589,734,367,178 | 90.91 | 93.08 |
| 12 | Dinas Kesehatan | 240,423,439,676 | 215,506,341,814 | 89.64 | 96.12 | Dinas Kesehatan | | 152,824,945,450 | 144,897,825,027 | 94.81 | 94.81 |
| 13 | Dinas Sosial | 70,088,220,126 | 61,891,855,967 | 88.31 | 97.09 | Dinas Sosial | | 64,303,414,155 | 60,943,407,091 | 94.77 | 99.56 |
| **Tahun Anggaran 2021** | | | | | | | **Tahun Anggaran 2022** | | | | | |
| **No** | **OPD** | **Pagu(Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Keu (%)** | **Fisik (%)** | **OPD** | | **Pagu(Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Keu (%)** | **Fisik (%)** |
|  | | | | | | |  | | | | | |
| 14 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 21,043,784,037 | 18,985,268,867 | 90.22 | 90.22 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | 27,593,271,125 | 23,718,160,281 | 85.96 | 85.22 |
| 15 | Dinas Perhubungan | 11,011,513,382 | 9,966,845,712 | 90.51 | 91.36 | Dinas Perhubungan | | 17,048,317,775 | 15,893,185,503 | 93.22 | 93.61 |
| 16 | Dinas Pariwisata | 20,180,056,749 | 18,016,442,322 | 89.28 | 100 | Dinas Pariwisata | | 19,604,219,955 | 18,876,399,603 | 96.29 | 96.29 |
| 17 | Dinas PU dan Penataan Ruang | 777,634,034,069 | 601,326,596,456 | 77.33 | 95.92 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | 728,413,249,237 | 603,329,673,266 | 82.83 | 97.02 |
| 18 | Dinas Koperasi UKM | 15,409,924,537 | 13,941,844,775 | 90.47 | 96.98 | Dinas Koperasi UKM | | 20,245,982,466 | 16,955,569,595 | 83.75 | 83.75 |
| 19 | Dinas Perdagangan | 21,955,808,489 | 17,022,019,810 | 77.53 | 90.00 | Dinas Perdagangan | | 22,934,229,019 | 20,983,420,590 | 91.49 | 96.49 |
| 20 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 191,661,581,685 | 147,890,955,534 | 77.16 | 99.88 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | | 163,494,513,895 | 143,204,694,587 | 87.59 | 99.96 |
| 21 | Dinas Peternakan & Keswan | 73,316,131,660 | 60,391,650,367 | 82.37 | 100 | Dinas Peternakan & Keswan | | 51,839,899,771 | 41,204,776,524 | 79.48 | 100 |
| 22 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 42,310,443,626 | 37,823,708,407 | 89.40 | 99.67 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | 54,545,369,139 | 51,514,307,360 | 94.44 | 99.25 |
| 23 | Dinas LH dan Kehutanan | 108,814,342,193 | 99,420,949,409 | 91.37 | 97.74 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | 162,487,133,159 | 155,518,537,564 | 95.71 | 95.71 |
| 24 | Dinas ESDM | 10,099,566,495 | 9,561,885,829 | 94.68 | 100 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | | 10,323,610,859 | 9,546,674,234 | 92.47 | 99.87 |
| 25 | Bappenda | 101,069,278,346 | 92,822,087,240 | 91.84 | 93.42 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | 110,913,198,496 | 107,347,004,255 | 96.78 | 97.59 |
| 26 | Inspektorat | 19,013,105,079 | 18,463,813,319 | 97.11 | 97.11 | Inspektorat | | 23,179,073,659 | 22,294,219,336 | 96.18 | 96.18 |
| 27 | Bappeda | 39,013,368,996 | 36,143,115,039 | 92.64 | 99.99 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | | 40,131,275,521 | 37,535,303,908 | 93.53 | 98.19 |
| 28 | BPKAD + SKPKD | 847,829,205,278 | 727,642,101,691 | 85.82 | 91.82 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | | 968,630,599,820 | 940,344,190,566 | 97.08 | 99.08 |
| 29 | Bakesbang Poldagri | 16,165,660,364 | 15,469,595,627 | 95.69 | 100 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | | 20,879,605,399 | 20,301,633,927 | 97.23 | 100 |
| 30 | Dinas Ketahanan Pangan | 10,748,266,702 | 10,317,647,256 | 95.99 | 100 | Dinas Ketahanan Pangan | | 10,980,920,320 | 9,892,471,135 | 90.09 | 100 |
| 31 | Dinas Penanaman Modal PTSP | 7,485,733,345 | 7,164,578,156 | 95.71 | 100 | Dinas Penanaman Modal PTSP | | 9,778,457,094 | 9,039,140,770 | 92.44 | 92.44 |
| 32 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | 14,757,252,014 | 14,278,731,095 | 96.76 | 100 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | | 30,101,331,339 | 28,904,318,919 | 96.02 | 99.83 |
| **Tahun Anggaran 2021** | | | | | | | **Tahun Anggaran 2022** | | | | | |
| **No** | **OPD** | **Pagu(Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Keu (%)** | **Fisik (%)** | **OPD** | | **Pagu(Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Keu (%)** | **Fisik (%)** |
|  | | | | | | |  | | | | | |
| 33 | Dinas PMPD Dukcapil | 15,944,184,112 | 15,659,653,848 | 98.22 | 100 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | 15,289,179,270 | 14,253,035,246 | 93.22 | 93.22 |
| 34 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB | 11,844,935,157 | 10,632,116,679 | 89.76 | 98.20 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | 10,138,486,158 | 9,453,953,090 | 93.25 | 93.25 |
| 35 | Badan Kepegawaian Daerah | 18,098,549,260 | 17,536,216,895 | 97.65 | 99.93 | Badan Kepegawaian Daerah | | 14,278,964,204 | 13,576,645,436 | 95.08 | 97.88 |
| 36 | RSU Provinsi | 684,941,681,413 | 425,196,960,650 | 62.08 | 100 | Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi | | 952,640,129,248 | 992,487,955,337 | 104.18 | 100 |
| 37 | RSJ Mutiara Sukma | 68,681,406,849 | 59,500,469,601 | 86.63 | 86.63 | Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi | | 67,105,042,595 | 61,261,592,560 | 91.29 | 100 |
| 38 | RS HL Manambai Abd Kadir Sumbawa | 74,700,987,104 | 74,700,987,104 | 100 | 82.86 | Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir | | 88,028,382,666 | 81,351,756,058 | 92.42 | 92.42 |
| 39 | Satuan Pol PP | 17,978,482,379 | 16,761,364,937 | 93.23 | 93.23 | Satuan Polisi Pamong Praja | | 20,306,564,866 | 18,105,798,415 | 89.16 | 100 |
| 40 | Badan Penghubung Daerah | 9,427,226,028 | 8,810,681,318 | 93.46 | 93.46 | Badan Penghubung Daerah | | 11,673,103,710 | 11,065,434,471 | 94.79 | 94.79 |
| 41 | BPBD | 12,757,717,064 | 11,121,279,943 | 87.17 | 100 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 9,972,315,762 | 8,429,072,383 | 84.52 | 100 |
| 42 | Dinas Perumahan dan Permukiman | 333,388,962,621 | 251,509,470,376 | 75.44 | 99.11 | Dinas Perumahan dan Permukiman | | 215,380,739,083 | 171,031,186,368 | 79.41 | 99.84 |
| 43 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 16,859,445,091 | 15,952,209,837 | 94.62 | 100 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | | 19,767,681,735 | 17,520,778,725 | 88.63 | 89.01 |
| 44 | Dinas Perindustrian | 28,551,760,349 | 20,646,603,236 | 72.31 | 82.38 | Dinas Perindustrian | | 23,505,595,735 | 20,980,337,238 | 89.26 | 96.71 |
| 45 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 45,727,017,323 | 45,301,956,114 | 99.07 | 99.07 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | | 32,695,681,113 | 30,181,921,386 | 92.31 | 92.31 |
| 46 | BRIDA | - | - | 0.00 | 0.00 | BRIDA | | 44,084,600,955 | 38,385,276,063 | 87.07 | 87.07 |
|  | Rumah Sakit Mata | - | - | 0.00 | 0.00 | Rumah Sakit Mata | | 30,103,365,157 | 27,448,714,897 | 91.18 | 91.18 |
|  | Rumah Sakit Mandalika | - | - | 0.00 | 0.00 | Rumah Sakit Mandalika | | 67,221,999,342 | 61,990,697,509 | 92.22 | 92.22 |
| 47 | BPSDM | 21,569,526,888 | 18,851,877,074 | 87.40 | 98.75 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | | 22,115,776,376 | 20,300,610,015 | 91.79 | 95.00 |
| **Jumlah Belanja** | | **6,380,316,797,911** | **5,523,462,401,386** | **86.57** | **96.48** | **Jumlah Belanja** | | **6,317,143,781,896** | **5,740,517,954,519** | **90.87** | **95.59** |
| **Belanja Operasi** | | **4,315,298,315,161** | **4,049,844,169,728** | **93.85** | **100** | **Belanja Operasi** | | **3,971,329,976,336** | **3,386,732,700,998** | **85.28** | **100** |
| **Belanja Modal** | | **1,247,827,460,776** | **749,642,304,854** | **60.08** | **72.09** | **Belanja Modal** | | **1,467,153,759,347** | **1,262,440,086,647** | **86.05** | **100** |
| **Belanja Tak Terduga** | | **58,606,843,539** | **33,376,765,102** | **56.95** | **68.34** | **Belanja Tak Terduga** | | **1,948,333,713** | **466,511,668** | **23.94** | **28.73** |
| **Transfer** | | **758,584,178,435** | **657,107,524,245** | **86.62** | **100** | **Transfer** | | **876,711,712,500** | **858,316,164,077** | **97.90** | **100** |

Sumber data : data excell e - monev, laporan realisasi anggaran BPKAD dan hard copy data realisasi Perangkat Daerah

1. **Program/Kegiatan DPA APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022**

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 pada bulan Desember secara umum realisasi penyerapan anggaran baru mencapai Rp. **14,015,055,556,189** (83.26%) dan progres fisik (82.50%). Berdasarkan laporan yang telah disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, serapan Belanja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3-7 progres APBD Kabupaten/Kota bulan Desember 2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun Anggaran 2022** | | | | | |
| **No** | **Kabupaten/Kota** | **Pagu(Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Keu (%)** | **Fisik (%)** |
|  | | | | | |
| 1 | Kota Mataram | 1,423,901,770,918 | 1,130,296,776,637 | 79.38 | 76.35 |
| 2 | Lombok Barat | 1,847,867,762,941 | 1,654,683,379,815 | 89.55 | 89.55 |
| 3 | Lombok Tengah | 2,508,909,994,413 | 2,343,138,146,978 | 93.39 | 93.39 |
| 4 | Lombok Utara | 941,260,034,633 | 788,094,313,798 | 83.73 | 83.73 |
| 5 | Lombok Timur | 3,288,532,770,241 | 2,605,775,681,958 | 79.24 | 79.24 |
| 6 | Sumbawa Barat | 1,170,832,351,827 | 1,115,803,231,291 | 95.30 | 95.30 |
| 7 | Sumbawa | 1,761,196,705,191 | 1,314,164,665,986 | 74.62 | 74.62 |
| 8 | Dompu | 1,223,464,758,068 | 1,102,511,462,797 | 76.76 | 76.76 |
| 9 | Bima | 1,858,624,691,773 | 1,396,047,138,881 | 77.39 | 77.39 |
| 10 | Kota Bima | 810,164,024,721 | 564,540,758,048 | 74.28 | 74.28 |
| **Jumlah Belanja** | | **16,833,685,609,688** | **14,015,055,556,189** | **83.26** | **82.50** |
| **Belanja Operasi** | | **12,010,274,359,752** | **9,513,329,502,382** | **79.21** | **79.21** |
| **Belanja Modal** | | **2,752,559,293,691** | **2,011,011,502,392** | **73.06** | **73.06** |
| **Belanja Tak Terduga** | | **95,884,425,308** | **55,190,614,127** | **57.56** | **57.56** |
| **Transfer** | | **1,974,967,530,937** | **1,730,560,130,575** | **87.62** | **87.62** |

Sumber data : - Laporan Realisasi Anggaran Kab./Kota dari Bid. Bina Evaluasi Kab./Kota BPKAD Prov. NTB

* Laporan Bulanan Kab./Kota Se Prov. NTB

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **PERMASALAHAN**

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022 pada bulan Desember secara umum realisasi penyerapan anggaran baru mencapai Rp. **5,740,517,954,519** (90.87%) dan progres fisik (95.59%). Realisasi Keuangan dan Fisik sampai dengan bulan Desember mencapai target 100%. Berdasarkan laporan yang telah disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, serapan Belanja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

* Belanja Operasi : 85.28%
* Belanja Modal : 86.05%
* Belanja Tak Terduga : 23.94%
* Transfer : 97.90%

Berdasarkan laporan realisasi keuangan dan fisik masing-masing Perangkat Daerah melalui aplikasi e-monev, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4-1 Realisasi APBD Prov. NTB Tahun Anggaran 2022 per Desember 2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **OPD** | **Pagu(Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Deviasi Serapan (Rp.)** | **Prosentase Realisasi** | | **Deviasi** | |
| **Keu (%)** | **Fisik (%)** | **Keu (%)** | **Fisik (%)** |
| 1 | Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi | 952,640,129,248 | 992,487,955,337 | -39,847,826,089 | 104.18 | 100.00 | 4.18 | 0.00 |
| 2 | Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah | 1,280,000,000 | 1,272,071,742 | 7,928,258 | 99.38 | 99.38 | -0.62 | -0.62 |
| 3 | Biro Administrasi Pimpinan | 8,703,600,000 | 8,560,295,960 | 143,304,040 | 98.35 | 98.35 | -1.65 | -1.65 |
| 4 | Biro Administrasi Pembangunan | 696,750,550 | 684,138,183 | 12,612,367 | 98.19 | 98.19 | -1.81 | -1.81 |
| 5 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | 20,879,605,399 | 20,301,633,927 | 577,971,472 | 97.23 | 100.00 | -2.77 | 0.00 |
| 6 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 968,630,599,820 | 940,344,190,566 | 28,286,409,254 | 97.08 | 99.08 | -2.92 | -0.92 |
| **No** | **OPD** | **Pagu(Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Deviasi Serapan (Rp.)** | **Prosentase Realisasi** | | **Deviasi** | |
| **Keu (%)** | **Fisik (%)** | **Keu (%)** | **Fisik (%)** |
| 7 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 110,913,198,496 | 107,347,004,255 | 3,566,194,241 | 96.78 | 97.59 | -3.22 | -2.41 |
| 8 | Biro Kesejahtraan Rakyat | 71,369,587,825 | 69,029,766,694 | 2,339,821,131 | 96.72 | 100.00 | -3.28 | 0.00 |
| 9 | Dinas Pariwisata | 19,604,219,955 | 18,876,399,603 | 727,820,352 | 96.29 | 96.29 | -3.71 | -3.71 |
| 10 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 3,102,192,000 | 2,985,050,032 | 117,141,968 | 96.22 | 96.22 | -3.78 | -3.78 |
| 11 | Inspektorat | 23,179,073,659 | 22,294,219,336 | 884,854,323 | 96.18 | 96.18 | -3.82 | -3.82 |
| 12 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | 30,101,331,339 | 28,904,318,919 | 1,197,012,420 | 96.02 | 99.83 | -3.98 | -0.17 |
| 13 | Biro Hukum | 1,302,000,000 | 1,248,893,284 | 53,106,716 | 95.92 | 95.92 | -4.08 | -4.08 |
| 14 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 162,487,133,159 | 155,518,537,564 | 6,968,595,595 | 95.71 | 95.71 | -4.29 | -4.29 |
| 15 | Badan Kepegawaian Daerah | 14,278,964,204 | 13,576,645,436 | 702,318,768 | 95.08 | 97.88 | -4.92 | -2.12 |
| 16 | Dinas Kesehatan | 152,824,945,450 | 144,897,825,027 | 7,927,120,423 | 94.81 | 94.81 | -5.19 | -5.19 |
| 17 | Badan Penghubung Daerah | 11,673,103,710 | 11,065,434,471 | 607,669,239 | 94.79 | 94.79 | -5.21 | -5.21 |
| 18 | Dinas Sosial | 64,303,414,155 | 60,943,407,091 | 3,360,007,064 | 94.77 | 99.56 | -5.23 | -0.44 |
| 19 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 54,545,369,139 | 51,514,307,360 | 3,031,061,779 | 94.44 | 99.25 | -5.56 | -0.75 |
| 20 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 128,177,831,741 | 120,649,100,319 | 7,528,731,422 | 94.13 | 94.13 | -5.87 | -5.87 |
| 21 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 40,131,275,521 | 37,535,303,908 | 2,595,971,613 | 93.53 | 98.19 | -6.47 | -1.81 |
| 22 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 10,138,486,158 | 9,453,953,090 | 684,533,068 | 93.25 | 93.25 | -6.75 | -6.75 |
| 23 | Dinas Perhubungan | 17,048,317,775 | 15,893,185,503 | 1,155,132,272 | 93.22 | 93.61 | -6.78 | -6.39 |
| 24 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 15,289,179,270 | 14,253,035,246 | 1,036,144,024 | 93.22 | 93.22 | -6.78 | -6.78 |
| 25 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 10,323,610,859 | 9,546,674,234 | 776,936,625 | 92.47 | 99.87 | -7.53 | -0.13 |
| 26 | Dinas Penanaman Modal PTSP | 9,778,457,094 | 9,039,140,770 | 739,316,324 | 92.44 | 92.44 | -7.56 | -7.56 |
| 27 | Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir | 88,028,382,666 | 81,351,756,058 | 6,676,626,608 | 92.42 | 92.42 | -7.58 | -7.58 |
| 28 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 32,695,681,113 | 30,181,921,386 | 2,513,759,727 | 92.31 | 92.31 | -7.69 | -7.69 |
| **No** | **OPD** | **Pagu(Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Deviasi Serapan (Rp.)** | **Prosentase Realisasi** | | **Deviasi** | |
| **Keu (%)** | **Fisik (%)** | **Keu (%)** | **Fisik (%)** |
| 29 | Rumah Sakit Mandalika | 67,221,999,342 | 61,990,697,509 | 5,231,301,833 | 92.22 | 92.22 | -7.78 | -7.78 |
| 30 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 22,115,776,376 | 20,300,610,015 | 1,815,166,361 | 91.79 | 95.00 | -8.21 | -5.00 |
| 31 | Dinas Perdagangan | 22,934,229,019 | 20,983,420,590 | 1,950,808,429 | 91.49 | 96.49 | -8.51 | -3.51 |
| 32 | Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi | 67,105,042,595 | 61,261,592,560 | 5,843,450,035 | 91.29 | 100.00 | -8.71 | 0.00 |
| 33 | Rumah Sakit Mata | 30,103,365,157 | 27,448,714,897 | 2,654,650,260 | 91.18 | 91.18 | -8.82 | -8.82 |
| 34 | Biro Organisasi | 2,002,339,000 | 1,821,365,523 | 180,973,477 | 90.96 | 90.96 | -9.04 | -9.04 |
| 35 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1,748,648,664,827 | 1,589,734,367,178 | 158,914,297,649 | 90.91 | 93.08 | -9.09 | -6.92 |
| 36 | Dinas Ketahanan Pangan | 10,980,920,320 | 9,892,471,135 | 1,088,449,185 | 90.09 | 100.00 | -9.91 | 0.00 |
| 37 | Dinas Perindustrian | 23,505,595,735 | 20,980,337,238 | 2,525,258,497 | 89.26 | 96.71 | -10.74 | -3.29 |
| 38 | Satuan Polisi Pamong Praja | 20,306,564,866 | 18,105,798,415 | 2,200,766,451 | 89.16 | 100.00 | -10.84 | 0.00 |
| 39 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 19,767,681,735 | 17,520,778,725 | 2,246,903,010 | 88.63 | 89.01 | -11.37 | -10.99 |
| 40 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 163,494,513,895 | 143,204,694,587 | 20,289,819,308 | 87.59 | 99.96 | -12.41 | -0.04 |
| 41 | Biro Perekonomian | 2,633,514,200 | 2,318,358,518 | 315,155,682 | 88.03 | 88.03 | -11.97 | -11.97 |
| 42 | BRIDA | 44,084,600,955 | 38,385,276,063 | 5,699,324,892 | 87.07 | 87.07 | -12.93 | -12.93 |
| 43 | Biro Umum | 111,152,072,271 | 96,388,589,977 | 14,763,482,294 | 86.72 | 100.00 | -13.28 | 0.00 |
| 44 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 27,593,271,125 | 23,718,160,281 | 3,875,110,844 | 85.96 | 85.22 | -14.04 | -14.78 |
| 45 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 9,972,315,762 | 8,429,072,383 | 1,543,243,379 | 84.52 | 100.00 | -15.48 | 0.00 |
| 46 | Dinas Koperasi UKM | 20,245,982,466 | 16,955,569,595 | 3,290,412,871 | 83.75 | 83.75 | -16.25 | -16.25 |
| 47 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 728,413,249,237 | 603,329,673,266 | 125,083,575,971 | 82.83 | 97.02 | -17.17 | -2.98 |
| 48 | Dinas Peternakan & Keswan | 51,839,899,771 | 41,204,776,524 | 10,635,123,247 | 79.48 | 100.00 | -20.52 | 0.00 |
| 49 | Dinas Perumahan dan Permukiman | 215,380,739,083 | 171,031,186,368 | 44,349,552,715 | 79.41 | 99.84 | -20.59 | -0.16 |
| **Jumlah Belanja** | | **6,317,143,781,896** | **5,740,517,954,519** | **342,382,105,248** | **90.87** | **95.59** | **-9.13** | **-4.41** |

Sumber data : data excell e - monev, laporan realisasi anggaran BPKAD dan hard copy data realisasi Perangkat Daerah

Dari tabel di atas dapat diketahi bahwa realisasi keuangan sampai dengan bulan Desember tahun 2022, dari 47 Perangkat Daerah ada 1 Perangkat Daerah yang mencapai target yang diharapkan (100%). Capaian realisasi keuangan adalah Rumah Sakit Umum Daerah (104%) dan yang terendah adalah Perumahan dan Pemukiman (79.41%). Sedangkan untuk realisasi fisik dari 47 Perangkat Daerah terdapat 5 Perangkat Daerah yang mencapai target yang diharapkan (100%). Capaian realisasi dari 47 Perangkat Daerah ada 9 Perangkat Daerah yang mencapai target yang diharapkan (100%) dan yang terendah adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (83.75%).

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan DPA APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 dapat disimpulkan permasalahan sebagai berikut :

* 1. Sikap kehati-hatian dari perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait refocusing anggaran yang masih diperlukan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat.
  2. Rumah Sakit Provinsi Daerah; Realisasi keuangan melebihi pagu karena realisasi BLUD yang lebih tinggi.
  3. Dinas Perumahan dan Pemukiman; sebaran lokasi penanganan sasaran program RLH yang menyebar (jarak tempuh dari satu rumah kerumah yang lain sangat jauh), Jumlah unit rumah yang ditangani pada paket anggaran sangat sedikit tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan hal ini yang menyebabkan kurang peminat dari pihak ketiga (rekanan) untuk berkenan melaksanakan program RLH, Kurang ketersediaan fasilitas kendaraan untuk monev, Terbatasnya keuangan yang ada di Kas Daerah dan APBD-P yang baru disyahkan sebagai dasar pembayaran kegiatan yang ada di APBD-P.

1. **SARAN**

Berdasarkan permasalahan yang ada maka beberapa saran alternatif tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Tahun Berikutnya Perangkat Daerah agar segera melaksanakan kegiatan – kegiatan yang tidak akan terkena refocusing anggaran.
2. Meminta Perangkat Daerah secara aktif melakukan koordinasi dengan BPKAD terkait perubahan mekanisme keuangan.
3. Mengingatkan Perangkat Daerah agar terlebih dahulu mengisi laporan melalui aplikasi e-monev (data excel) yang selanjutnya menjadi dasar pengisian format rekapitulasi manual.
4. Mendorong Perangkat Daerah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, namun tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Dengan tersusunnya laporan bulanan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penyerapan anggaran untuk setiap program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian laporan bulanan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |
| --- |
| Mataram, Januari 2023 |
| Kepala Biro Administrasi Pembangunan  Sekretariat Daerah Provinsi NTB,  **Muhamad Riadi, S.P., M.Ec. Dev.**  Pembina Utama Muda (IV/c)  NIP. 19681231 199203 1 095 |